



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**UNIT KERJA** : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : WENDRA ROVIKTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 666294

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.495.000.000

1. Tanah Seluas 135 m2 di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
2. Tanah Seluas 138 m2 di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 332.500.000

1. MOTOR, YAMAHA B65 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 95.500.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 25.256.730

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.948.256.730

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 1.948.256.730

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**UNIT KERJA** : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ELIREN YANA YORI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 865771

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 445.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 6.88 m2/9 m2 di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. Tanah Seluas 4.92 m2 di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. Tanah Seluas 7013 m2 di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 297 m2 di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 139.000.000

1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 136 M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA NC 110 D Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA FIC02N28LO A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 9.900.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 4.500.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 598.400.000

**III. HUTANG**

Rp. 125.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 473.400.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**UNIT KERJA** : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AFRIDA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 836432

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 648 m<sup>2</sup>/135 m<sup>2</sup> di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 250.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ----

**D. SURAT BERTHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 4.000.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 754.000.000

**III. HUTANG**

Rp. 146.049.378

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 607.950.622

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.